



Dugaan Korupsi Lahan Sumber Waras Makin Mencuat

DUGAAN korupsi dalam pembelian tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, senilai Rp 775,69 miliar yang menyeret nama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, makin mencuat. Terakhir, mantan Wakil Gubernur Prijanto ikut berkomentar terkait persoalan tersebut.

Purnawirawan Jenderal bintang dua itu menilai, hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya soal pembelian tanah RS Sumber Waras, yang tertulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD DKI 2014, BPK bukanlah fitnah atau tanpa data.

"Dalam mengeluarkan LHP tentu BPK tidak sembarangan. Saya meyakini kebenaran LHP BPK mengenai dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut," ujar Prijanto kepada wartawan, Rabu (5/8).

Prijanto juga mendukung, apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengusut temuan BPK tersebut. "Kita apresiasi dan dukung tentunya dong," katanya. Menurutnya juga, setiap orang bisa dan boleh membaca LHP BPK yang sudah menjadi milik publik.

Lebih lanjut, dia menjelaskan jika KPK sudah bergerak, tentu sudah melakukan koordinasi dengan BPK dan ada keyakinan bahwa kasus tersebut memang patut diduga ada tindak pidananya. "Ada kerugian negaranya dan ada yang diuntungkan dalam pembelian tanah sumber waras ini," jelasnya.

Sementara itu, kemarin (5/8), puluhan pemuda yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Jakarta dan Front Mahasiswa Pembela Kebenaran dan Ikatan Generasi Muda Kristiani berdemo di depan Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Mereka berdemo dan membagikan selebaran kepada para pengendara dan pejalan kaki yang melintas.

Dalam selebaran tersebut, mereka meminta KPK untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait masalah pembelian lahan RS Sumber Waras yang mereka duga ada kerugian negara sebesar Rp 191.334.550.000.

Pembelian lahan tersebut berdasarkan SK Gubernur No. 2136 tahun 2014. "Ahok yang kita kenal selama ini anti-korupsi, ternyata dia juga bermain anggaran saudara-saudara," kata seorang demonstran dalam orasinya. Demonstrasi berjalan damai dan tidak mengakibatkan kemacetan di depan Gedung KPK.

Sementara itu, dalam sejumlah kesempatan, Ahok mengaku tidak terima dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014. Terlebih BPK memasukkan pengadaan tanah RS Sumber Waras sebagai satu temuan yang dianggap berpotensi merugikan daerah sebesar Rp 191,33 miliar.

"Saya tidak terima kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Saya mau tanya, bisa tidak ada beli tanah (dengan harga) NJOP di tengah kota dan siap bangun? Itu yang terjadi saat lahan Rumah Sakit Sumber Waras mau jual," tandasnya. **(wok)**